

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali AchmadChomzah, 2003. Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- BachtiarEffendie, 1993. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Alumni.
- Boedi Harsono, 2008. Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan.
- Elza Syarief, 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah, Jakarta: PT. Gramedia.
- G. Kertasapoetra dkk, 1985. Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Bakri, 2007. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurullah, 1999. Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau, Padang: PT. Singgalang Press.
- NurnaningsihAmrin, 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: Grafindo Persada.
- Rosnidar Sembiring, 2017. Hukum Pertanahan Adat, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Rusmandi Murad, 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni.
- SamunIsmaya, 2011. Pengantar Hukum Agraria, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarjita, 2005. Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Sudarsono, 2002. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Takdir Rahmadi, 2011. Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers.

Urip Santoso, 2010. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Media Group.

Yahya Harahap, 2009. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2011. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

A. Jurnal

Lutfi Nasution, 2001. *Catatan Ringkas Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah*, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sarasehan Oleh Badan Pertanahan Nasional, Jakarta